

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Provinsi
Kepulauan Riau

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

**Provinsi
Kepulauan Riau**

2019



<https://kepri.bps.go.id>

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2019**

ISBN : 978-623-6931-01-1
No. Publikasi : 21550.2007
Katalog : 4102002.21

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 103 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pencetak Oleh:
CV. Berkah Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Pengarah
Agus Sudibyo

Penanggung Jawab
Zunadi

Editor
Zunadi

Penulis
Nur Ihklas

Pengolah Data
Nur Ihklas

Desain Sampul dan Infografis
Tri Retno Puspitasari



Kata Pengantar

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2019” merupakan publikasi yang rencananya akan disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan tingkat pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau antarwaktu dan perbandingannya antarkabupaten/kota serta antar-daerah perkotaan dan pedesaan. Data yang digunakan, bagian terbesar dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan bulan Agustus 2019 (terutama data ketenagakerjaan). Namun demikian, sebagian kecil juga menggunakan data dari sumber lain (data sekunder).

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek - aspek yang dapat diukur dan datanya tersedia, seperti: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, PDRB, perumahan serta sosial budaya.

Publikasi ini terwujud berkat kerja keras tim penyusun dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dan dengan dukungan para penyedia data baik primer maupun sekunder. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dengan harapan agar upaya penyempurnaan terus dilakukan secara profesional. Selanjutnya kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penyajian serupa di masa mendatang.

Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,



Agus Sudiby, M.Stat

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	10
1.3. Distribusi Penduduk.....	5
1.4. Komposisi Penduduk	6
Bab 2. Metodologi	13
2.1. Konsep Pembangunan Manusia	15
2.2. Mengukur Pembangunan Manusia	18
2.3. Perubahan Metodologi IPM	20
Bab 3. Capaian Pembangunan Manusia	27
3.1. Posisi Kepulauan Riau.....	29
3.2. Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota	32

Bab 4. Perkembangan Pembangunan Manusia	45
Bab 5. Tantangan Pembangunan Manusia	57
5.1. Tantangan di Bidang Kesehatan	59
5.2. Tantangan di Bidang Pendidikan	68
5.2. Tantangan di Bidang Ekonomi	71
Bab 6. Disparitas Pembangunan Manusia	79
Bab 7. Pembangunan Pemberdayaan Gender	93
7.1. Indeks Pembangunan Gender	95
7.2. Indeks Pemberdayaan Gender	99

<https://kepri.dns.go.id>

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP.....	23
Tabel 4.1. Perkembangan IPM kabupaten/kota selama Tahun 2015-2019.....	47
Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2019.....	63
Tabel 5.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	66
Tabel 5.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	73
Tabel 5.4. Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019.....	74
Tabel 5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	75
Tabel 6.1. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	87
Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2019.....	74
Tabel 7.1. IDG Menurut Indikator dan Kabupaten Kota di Kepulauan Riau Tahun 2019.....	102

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1. IPM Metode Baru Provinsi Se-Sumatera Tahun 2019.....	31
Gambar 3.2. Angka IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	33
Gambar 4.1. Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2013-2019.....	46
Gambar 4.2. Perkembangan UHH Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2013-2019.....	49
Gambar 4.3. Perkembangan Rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.....	50
Gambar 4.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kepulauan Riau Tahun 2019.....	52
Gambar 4.5. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Juta).....	55
Gambar 5.1. Perkembangan Angka Kesakitan Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019 (%).....	60
Gambar 5.2. APS Usia Penduduk 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2017-2019 (%)	69
Gambar 5.3. APM Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2017-2019 (%).....	71
Gambar 6.1. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kota di Kepulauan Riau, 2019.....	80

Gambar 6.2.	Klasifikasi IPM Kabupaten Kota di Kepulauan Riau Tahun 2019.....	83
Gambar 6.3.	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019.....	84
Gambar 6.4.	Perkembangan Selisih AHH Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019.....	47
Gambar 6.5.	Perkembangan Selisih Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019.....	88
Gambar 6.6.	Perkembangan Selisih Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019.....	89
Gambar 6.7.	Perkembangan Selisih Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019.....	91
Gambar 7.1.	IPG Kepulauan Riau dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019.....	98
Gambar 7.2.	IDG Menurut Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	101

BAB 1 P E N D A H U L U A N



IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat)



BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada dua dekade terakhir ini, banyak kajian yang dilakukan oleh dunia internasional terkait dengan manusia sebagai objek dan tujuan utama dalam pembangunan. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dimana sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product (GNP)*. Faktanya, masih dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi tetapi juga peningkatan kualitas manusianya dan sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan

melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi yang beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan?

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Development Programme (UNDP)* menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan sedangkan indikator

pengeluaran per kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur standar hidup layak.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori *Cobb-Douglas*). Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Demi memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia yang dapat ditafsirkan juga sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya melihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi suatu daerah sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi daerah itu harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan daerah. Dengan pemerataan pembangunan daerah terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan daerah.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah semakin bergairah menuju ke arah yang lebih baik. Namun perlu disadari, perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan tetapi secara bertahap sesuai dengan proses kebijakan yang berjalan. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Dengan adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang bermuatan kearifan lokal, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antar kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Seperti contoh wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah lain di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang berkualitas ke kota. Sebagai konsekuensinya, daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah.

Tujuan utama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mencapai pembangunan manusia Kepulauan Riau seutuhnya dan pembangunan masyarakat Kepulauan Riau seluruhnya. Hal ini diwujudkan dengan memfokuskan perhatian pembangunan daerah Kepulauan Riau pada manusia sebagai titik sentral yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan

hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, tentunya dibutuhkan masyarakat yang tidak hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga maju dari segi kualitas. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah daerah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Kepulauan Riau yang berkualitas.

Saat ini tampaknya pemerintah daerah sangat perhatian dengan *issue* pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan

dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antarwilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kesadaran akan demokrasi, desentralisasi menjadi salah satu pilihan dalam upaya menggerakkan roda pembangunan. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antar kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis mengenai capaian IPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta disparitasnya di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2019.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan strategis yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia serta masukan bagi pemerintah daerah sebagai alat bantu perencanaan (*planning tool*) pembangunan yang lebih mengakomodasi dimensi pembangunan manusia. Misalnya melalui peningkatan anggaran pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat pra sejahtera agar dapat mandiri secara ekonomi lainnya.

1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun dengan beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menyediakan data IPM dan komponennya untuk level provinsi dan kabupaten/kota untuk periode 2015-2019.

- b. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek pendidikan.
- c. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek kesehatan.
- d. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek pembangunan ekonomi.

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 2 METODOLOGI

IPM:

Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),
2. Pengetahuan (*knowledge*),
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

BAB 2

Metodologi

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*). Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia ini berbeda dengan konsep klasik pembangunan yang dititikberatkan pada

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia ditekankan pada manusia itu sendiri sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan sehingga masyarakat memperoleh perluasan pilihannya untuk hidup dengan kebebasan dan bermartabat. Selain itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Pembangunan suatu wilayah yang pada awalnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita dimana pembangunan tersebut cenderung memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi, namun seiring dengan perkembangan jaman paradigma seperti ini mulai bergeser yakni dengan melibatkan peranan manusia sebagai tujuan dari pembangunan (kesejahteraan masyarakat). Pendekatan pembangunan manusia yang menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat (pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai

kultural) dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

2.2. Mengukur Pembangunan Manusia

Dalam mengukur pembangunan manusia secara ideal dibutuhkan banyak indikator karena seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa pembangunan manusia dilakukan secara komprehensif di seluruh bidang kehidupan, namun terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur pembangunan manusia yang dipakai secara luas di seluruh negara.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari *Yale University* dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Kemudian pada tahun 1990, UNDP

memperkenalkan IPM dan mempublikasikannya secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (2) pengetahuan (*knowledge*), dan (3) standar hidup layak (*descent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapaun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Manfaat IPM diantaranya adalah merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara serta bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3. Perubahan Metodologi IPM

Sejarah Perjalanan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah vertikal yang diberikan kewenangan untuk menghitung angka IPM di Indonesia. BPS menggunakan acuan dari UNDP dalam mempublikasikan angka IPM. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, angka IPM telah mengalami penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995.

Angka IPM pertama kali yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat (dengan menggunakan proksi angka harapan hidup saat lahir), dimensi pengetahuan (dengan menggunakan proksi angka melek huruf dewasa, dan dimensi standar hidup layak (dengan menggunakan proksi PDB per kapita). Ketiga dimensi tersebut diintegrasikan menjadi sebuah indeks komposit dengan menggunakan rata-rata aritmatik sehingga menghasilkan angka IPM.

Tahun 1991, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-

rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan, sehingga sejak saat itu terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Pemberian bobot mutlak dilakukan dalam penghitungan dimensi pengetahuan yakni bobot dua pertiga untuk indikator angka melek huruf dan sisanya satu per tiga untuk indikator rata-rata lama sekolah.

Tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan mengganti indikator rata-rata lama sekolah menjadi angka partisipasi kasar gabungan. Pembobotan masih tetap sama seperti pada sebelumnya yakni dua per tiga untuk angka melek huruf dan satu per tiga untuk gabungan angka partisipasi kasar.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM secara drastis. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator angka partisipasi kasar gabungan diganti dengan indikator harapan lama sekolah. Kemudian, indikator PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan indeks kompositnya pun ikut berubah dimana sebelumnya menggunakan metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik. Mengingat

banyak perubahan yang terjadi dalam penghitungan IPM tahun 2010 ini, maka UNDP menyebut metode penghitungan IPM yang berubah pada tahun 2010 ini sebagai metode baru.

Perubahan ternyata tidak berhenti sampai disitu saja. Tahun 2011, penyempurnaan dilakukan pada tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 diganti menjadi tahun 2005. Kemudian pada tahun 2014, dua penyempurnaan kembali dilakukan yakni (1) mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011 dan (2) merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Keseluruhan perubahan yang terjadi didasarkan pada alasan-alasan rasional:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Seperti Angka Melek Huruf (AMH) dan PDB per kapita. AMH dianggap sudah tidak sensitif lagi dalam mengukur dimensi pengetahuan karena di sebagian besar wilayah angkanya sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pengetahuan (pendidikan) antarwilayah dengan baik. Sedangkan PDB per kapita dianggap kurang relevan untuk mengukur dimensi standar hidup layak karena masih mengandung faktor

produksi asing yang tidak dinikmati oleh penduduk lokal. Oleh karena itu PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik memiliki kekurangan yakni capaian dimensi yang rendah dapat ditutupi oleh capaian dimensi yang tinggi. Padahal pada dasarnya konsep yang diusung oleh pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan.

Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH) & Angka Partisipasi Kasar Gabungan (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS) & Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB Per Kapita	PNB Per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometri

Sumber Data : IPM Metode Baru, 2014

Perubahan yang terjadi pada penghitungan IPM tersebut tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada

dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. Pertama, perubahan level IPM. Level IPM metode baru menghasilkan angka yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh perubahan indikator AMH menjadi HLS dimana sebelumnya angka AMH bernilai di atas 90 persen, sedangkan angka HLS masih rendah. Perubahan metode agregasi yang sebelumnya menggunakan rata-rata aritmatik kemudian berubah menjadi rata-rata geometrik juga berdampak pada turunnya nilai level IPM. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan yang terjadi pada level IPM secara otomatis akan merubah peringkat IPM antardaerah. Namun demikian perlu ditekankan bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena metodenya berbeda.

Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Mulai tahun 2014, Indonesia secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Namun demikian, BPS sebagai lembaga yang berwenang dalam menghitung angka IPM di Indonesia melakukan sedikit modifikasi dalam penghitungan angka IPM. Penyesuaian tersebut

dilakukan karena masalah ketersediaan data. Data PNB per kapita tidak tersedia sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dimana penghitungan pengeluaran per kapita yang disesuaikan tersebut menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 3

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KEPULAUAN RIAU

IPM:
75,48

- 1 UHH -- 69,80 tahun
- 2 RLS -- 9,99 tahun
HLS-- 12,83 tahun
- 3 Pengeluaran perkapita yang
d disesuaikan--Rp. 14.466 ribu/tahun

BAB 3

Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

3.1. Posisi Kepulauan Riau

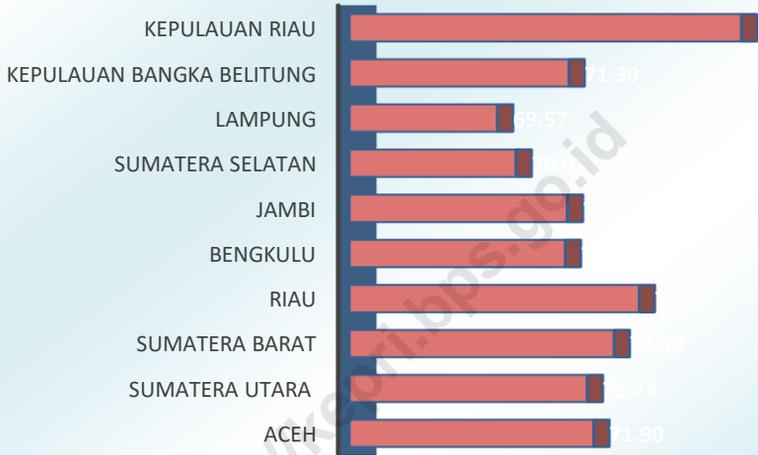
Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 < IPM < 80$), kategori sedang ($60 < IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2019 termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini mengantarkan Kepulauan Riau berada pada posisi ke empat dari seluruh provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 75,48 dimana angka IPM tersebut merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (melalui indikator Angka Harapan Hidup-AHH), pengetahuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah-RLS dan Angka Harapan Lama Sekolah-HLS), serta standar hidup layak (melalui indikator pengeluaran per kapita-PPP).

BPS mencatat bahwa AHH Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 69,80 yang berarti bahwa harapan hidup seorang bayi yang baru lahir di Kepulauan Riau rata-rata dapat bertahan hidup selama 69,80 tahun. Capaian dimensi pengetahuan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing sebesar 9,99 dan 12,83. Rata-rata lama sekolah sebesar 9,99 diartikan sebagai waktu yang ditempuh penduduk Kepulauan Riau berusia 25 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal rata-rata 9,99 tahun atau setara dengan kelas X sedangkan harapan baru muncul bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,83 tahun atau setara Diploma I. Terakhir, dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator pengeluaran per kapita mencapai Rp 14,466 juta per tahun.

Berdasarkan Gambar 3.1 tentang gambaran IPM provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera, maka di regional Sumatera, posisi IPM Kepulauan Riau menduduki posisi teratas. Hal tersebut patut dibanggakan mengingat Kepulauan Riau tergolong provinsi baru namun mampu bersaing dengan provinsi yang sudah lebih lama terbentuk.

Gambar 3.1. IPM Metode Baru Provinsi Se-Sumatera Tahun 2019



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Tahun 2019, hanya ada satu provinsi di regional Sumatera yang masuk dalam kategori IPM "sedang" yakni Lampung dengan nilai IPM 69,57. Sedangkan provinsi lainnya seperti Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan masuk dalam kategori IPM "tinggi". IPM Riau dan Sumatera Barat menjadi IPM tertinggi kedua dan ketiga setelah Kepulauan Riau.

3.2. Capaian Pembangunan Manusia di kabupaten/kota

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau tahun 2019 mencapai 75,48 dan telah berstatus “tinggi”. Sedangkan capaian IPM di tingkat Kabupaten/Kota bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata.

Capaian IPM Kabupaten/Kota tertinggi di Kepulauan Riau adalah Kota Batam yakni mencapai 81,09 pada tahun 2019 atau berstatus “sangat tinggi”. Sementara itu, capaian terendah adalah Kabupaten Lingga dengan angka IPM sebesar 64,98 pada tahun 2019 atau berstatus “sedang”. Beberapa kabupaten/kota yang berstatus IPM “tinggi” adalah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Sementara itu, kabupaten/kota dengan status IPM “sedang” adalah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambar 3.2. Angka IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota ditunjukkan oleh Gambar 3.2. Pembangunan manusia Kota Batam dan Kota Tanjungpinang lebih baik dari Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjukkan dengan nilai IPM kedua kota tersebut berada di atas angka IPM Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Sebaliknya, lima kabupaten lainnya memiliki angka IPM di bawah angka provinsi yakni Kabupaten Bintan dengan angka IPM 73,98; Kabupaten Natuna dengan angka IPM 72,63; Kabupaten Karimun dengan angka IPM 71,10; serta Kabupaten Kepulauan Anambas

dan Kabupaten Lingga masing-masing dengan angka IPM 68,48 dan 64,98.

Pencapaian pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM bukan semata-mata hanya diukur dari tingginya capaian IPM saja. Namun juga perlu dikaji lebih dalam lagi sejauh mana kecepatan pembangunan manusia pada suatu periode tertentu. Proses pencapaian pembangunan manusia inilah yang menjadi poin penting karena secara filosofi untuk mencapai suatu rangking atau posisi yang baik diperlukan *effort* lebih. Kecepatan pertumbuhan IPM merupakan salah satu indikator yang patut dipertimbangkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia.

Kota Batam dengan angka IPM tertinggi di Kepulauan Riau

Sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau, Batam dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku, bangsa, agama, dan ras. Dari sisi ekonomi, Batam sebagai pusat industri di wilayah semenanjung Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi daya tarik Batam, penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan dari luar negeri

berbondong-bondong ke Batam untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tidaklah mengherankan jika sebutan kota metropolitan layak disandingkan untuk Batam. Dan tentunya Batam menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Riau, bahkan Batam menguasai lebih dari separuh perekonomian Kepulauan Riau.

Indeks Pembangunan Manusia Batam tahun 2019 mencapai 81,09 dan berstatus IPM “sangat tinggi”. Tingginya IPM Batam didorong oleh dimensi kesehatan masyarakat Batam yang sudah bagus. Dimensi kesehatan yang didekati oleh indikator AHH dimana AHH Batam mencapai 73,24. Artinya penduduk Batam yang baru lahir berpeluang untuk hidup sampai dengan umur 73 tahun mendatang.

Faktor pendorong tingginya IPM Batam yang kedua adalah dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Batam mencapai 11,12 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 12,95 tahun. Sebagian besar penduduk Batam telah sadar akan pentingnya tingkat pendidikan dan pemerintah daerah memberikan fasilitas pendidikan yang layak.

Sementara itu, capaian Batam dari dimensi ekonomi masih rendah dibandingkan dengan komponen IPM lainnya. Pengeluaran per kapita Batam sebesar Rp 17,56 juta per tahun. Capaian IPM Batam yang sudah bagus dan harus dipertahakan adalah pada dimensi kesehatan sedangkan untuk dimensi pendidikan dan ekonomi perlu ditingkatkan agar pembangunan manusia tercapai secara merata di seluruh bidang kehidupan.

Lingga sebagai kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat tahun 2019

Secara singkat, Kabupaten Lingga merupakan asal-usul kerajaan melayu yang ada di Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sejarah melayu sangat kental terasa di Kabupaten Lingga. Pusat kerajaan berada di kota Daik, maka tidak mengherankan jika Kabupaten Lingga sering mendapatkan julukan Bunda Tanah Melayu.

Secara geografis, Kabupaten Lingga berbatasan dengan Kota Batam dan Laut Cina Selatan di sebelah Utaranya, kemudian sebelah Selatan dengan Laut Bangka dan Pulau Berhala, sebelah Barat dengan Laut Indragiri Hilir dan sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan.

Sebagian besar daerah Lingga adalah berbukit-bukit. Hampir 75 ribu ha merupakan daerah berbukit dan hanya 11 ribu ha saja yang merupakan daratan. Daerah Lingga juga memiliki topografi daerah dengan kemiringan yang sangat dominan, hampir 77 persen daerah Lingga memiliki kemiringan yang tajam.

Kabupaten Lingga memiliki 13 kecamatan dengan luas total 211 772 km². Hanya 1 persen saja yang daratan seluas 2117,72 km² sedangkan sisanya 99 persen merupakan lautan. Lingga memiliki 531 pulau besar dan kecil dengan 437 diantaranya belum berpenghuni.

Pemkab Lingga terus melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan IPM daerah Lingga. Program tersebut menasar di seluruh dimensi dari komponen-komponen IPM. Hal tersebutlah yang mendorong percepatan IPM Lingga selama tahun 2019 menjadi IPM dengan percepatan paling tinggi 1,44 persen jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Meskipun IPM Lingga hingga saat ini masih terendah di bandingkan kabupaten/kota lainnya, namun menjadi hal yang tidak mustahil jika percepatan Lingga ini terus konsisten dari tahun ketahun akan meningkatkan posisi IPM Lingga.

Bahkan lebih fantastis lagi bahwa Lingga dinobatkan sebagai Kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat di Kepulauan Riau selama kurun waktu 5 tahun terakhir (dari tahun 2015 sampai tahun 2019). Selama periode tersebut, angka IPM Lingga tumbuh sampai dengan 6,04 persen atau meningkat 1,21 persen per tahunnya.

IPM Lingga tahun 2019 mencapai 64,98 atau berstatus IPM “sedang”. Angka harapan hidup saat lahir mencapai 61,75 yang berarti bahwa seorang bayi Lingga yang lahir dapat hidup rata-rata sampai dengan umur 61 tahun. Sementara itu, pada dimensi pendidikan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 6,51 dan 12,44. Rata-rata lama sekolah sebesar 6,51 diartikan bahwa penduduk Lingga yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam pendidikan formal selama 6,51 tahun atau setara dengan kelas VII. Sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 12,44 diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Lingga berusia 7 tahun ke atas mencapai 12,44 tahun atau setara dengan diploma I.

Dari dimensi ekonomi, indikator pengeluaran per kapita Lingga mencapai Rp12,091 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau, pengeluaran per kapita Lingga dapat dikategorikan terendah, hanya satu tingkat di atas Kabupaten Anambas dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp12,065 juta per tahun.

Harapan Lama Sekolah Tertinggi se-Kepulauan Riau di Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat pemerintahan, Tanjungpinang memiliki fasilitas publik yang cukup memadai. Fasilitas publik tersebut digunakan sebagai alat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pembangunan manusia di Tanjungpinang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program kerja pemerintah daerah disamping peningkatan ekonominya.

Angka IPM Tanjungpinang tahun 2019 berada pada level 78,73 atau berstatus “tinggi”. Tingginya pembangunan manusia di Tanjungpinang didorong oleh

tingginya pencapaian dimensi kesehatan dan pendidikan. Angka harapan hidup waktu lahir penduduk Tanjungpinang sebesar 71,93 tahun. Sementara itu, dimensi pendidikan yang diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 9,99 tahun dan 14,09 tahun.

Rata-rata lama sekolah sebesar 9,99 tahun dapat diartikan bahwa penduduk Tanjungpinang yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam pendidikan formal selama 9,99 tahun atau telah melaksanakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 14,09 tahun yang berarti bahwa penduduk Tanjungpinang diharapkan akan dapat menikmati pendidikan selama 14,09 tahun. Angka harapan lama sekolah di Tanjungpinang sebesar 14,09 merupakan tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Hal ini mengandung maksud bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Tanjungpinang layak dan memadai.

Pembentuk angka IPM lainnya yakni pengeluaran per kapita Tanjungpinang tahun 2019 mencapai Rp 15,838 juta per tahun. Dari keempat indikator pembentuk IPM, indikator pengeluaran per kapita inilah yang paling rendah

pencapaiannya. Dengan demikian, masih ada peluang yang sangat lebar untuk meningkatkan pembangunan manusia Tanjungpinang dari sisi ekonominya.

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 4

PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KEPULAUAN RIAU

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 4

Perkembangan Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Terus Meningkat

Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama kurun waktu 2013-2019 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2013 sebesar 73,02 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau tahun 2019 mencapai 75,48. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

Desentralisasi pemerintahan di wilayah Indonesia ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Hal positif tersebut dikaitkan dengan pembangunan manusia yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Persaingan pemerintah daerah dalam rangka membawa masyarakatnya mencapai kemakmuran tidak dapat diragukan keabsahannya. IPM sebagai tolak ukur pembangunan manusia dapat dijadikan acuan untuk

melihat sejauh mana pembangunan manusia di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Gambar 4.1. Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2013-2019



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Jika melihat dari Gambar 4.1 maka percepatan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2019. Sedangkan percepatan terendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 0,33 persen. Pola perkembangan angka IPM kabupaten/kota di Kepulauan Riau secara umum sama dengan IPM Kepulauan Riau yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan. Ada satu kabupaten yang mencapai

pertumbuhan IPM di atas lima persen yaitu Kabupaten Lingga yang mengalami pertumbuhan IPM sebesar 6,04 persen. Sementara itu, pertumbuhan IPM paling lambat selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi di kota Tanjungpinang yakni tercatat sebesar 1,50 persen.

Tabel 4.1. Perkembangan IPM kabupaten/kota selama Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)
1	Karimun	2,73
2	Bintan	2,86
3	Natuna	2,48
4	Lingga	6,04
5	Anambas	3,98
6	Batam	2,21
7	Tanjungpinang	1,50

Sumber Data : BPS, BRS IPM Kepulauan Riau 2019

Sementara itu rata-rata pertumbuhan IPM per tahun (2015-2019) dari mulai yang terendah sampai dengan tertinggi adalah sebagai berikut: kota Tanjungpinang dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,30 persen; Kota Batam sebesar 0,44 persen; Kabupaten Natuna sebesar 0,50 persen; Kabupaten Karimun sebesar 0,55 persen; Kabupaten Bintan sebesar 0,57 persen; Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,80 persen dan Kabupaten Lingga sebesar 1,21 persen.

Apabila ditelusuri lebih jauh, wilayah yang mencatat perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan capaian IPM rendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Terbukti bahwa wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi, misalnya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Angka Harapan Hidup Meningkat, Dimensi Kesehatan Membaik

Pepatah mengatakan bahwa kesehatan adalah investasi penting bagi manusia. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan keadaan tubuh yang tidak sehat. Untuk itu, dewasa ini telah banyak berkembang ilmu kesehatan dalam hal mendukung manusia untuk tetap sehat sehingga peluang hidup lebih panjang semakin tinggi.

Salah satu tujuan pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-pilihan manusia untuk hidup lebih lama (berumur panjang). Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator ini

merupakan gambaran dari keadaan kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir mengandung arti harapan hidup seorang bayi yang baru lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup saat lahir maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pula kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Selama kurun waktu 2013-2019, angka harapan hidup Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen. Angka harapan hidup Kepulauan Riau tahun 2013 mencapai 69,05 artinya seorang bayi Kepulauan Riau yang lahir mempunyai peluang hidup sampai 69,05 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2019 mencapai angka 69,80.

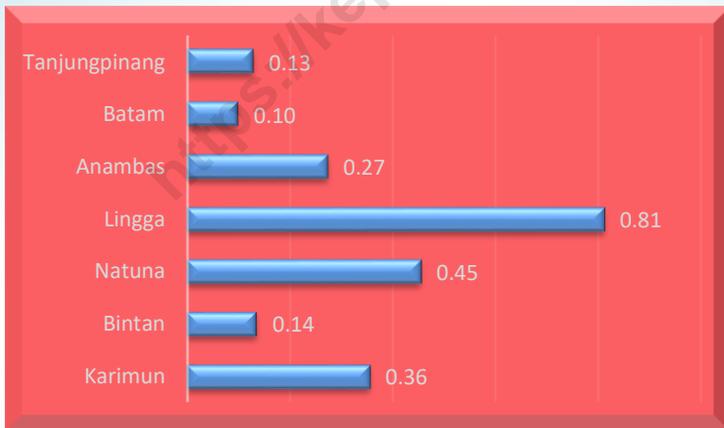
Gambar 4.2. Perkembangan UHH Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2013-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Kepulauan Riau 2019

Secara spasial, kondisi angka harapan hidup saat lahir kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2015-2019 juga mengalami peningkatan. Laju peningkatan angka harapan hidup masing-masing kabupaten/kota bervariasi antara 0,04 persen sampai dengan 0,23 persen. Laju peningkatan angka harapan hidup tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.

Gambar 4.3. Perkembangan Rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Kepulauan Riau 2019

Kabupaten Lingga dengan angka AHH terendah ternyata memiliki perkembangan AHH yang cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga dalam mengejar ketertinggalan kesehatan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai AHH tinggi, perkembangan AHH-nya semakin melambat.

Pendidikan Membaik, Wawasan Masyarakat Semakin Luas

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan kesehatan dan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Dimensi pendidikan dalam kaitannya dengan penghitungan IPM didekati dengan indikator rata-rata lama sekolah (MYS) dan angka harapan lama sekolah (EYS). Semakin tinggi angka MYL dan EYS maka

pembangunan manusia dari sisi pendidikan semakin tinggi pula.

Gambar 4.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kepulauan Riau Tahun 2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Kepulauan Riau 2019

Selama periode 2015-2019, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 1,02 persen untuk MYS dan 1,00 persen untuk EYS. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tahun 2019 mencapai 9,99, artinya bahwa penduduk

usia 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,99 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Riau tahun 2019 mencapai 12,83 yang berarti bahwa anak umur 7 tahun yang baru masuk SD mempunyai harapan sekolah sampai 12,83 tahun atau setara dengan Diploma III. Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa kondisi pendidikan di Kepulauan Riau secara umum cukup bagus.

Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kabupaten/kota memiliki pola yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Selama kurun waktu 2015-2019, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten/kota di Kepulauan Riau terus meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Lingga dimana selama kurun 5 tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tumbuh sebesar 3,95 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Kota Tanjungpinang yakni hanya sebesar 0,10 persen. Lambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Tanjungpinang dapat dipahami karena sebagian besar penduduknya telah mengenyam pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi.

Capaian dan perkembangan harapan lama sekolah di tingkat kabupaten/kota cenderung lebih bervariasi. Capaian dan pertumbuhan harapan lama sekolah tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir mencapai 2,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai harapan yang lebih besar akan pendidikan. Sementara itu, pertumbuhan harapan lama sekolah terendah terjadi di Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang yakni hanya tumbuh 0,07 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Standar Hidup Meningkat, Kesejahteraan Semakin Dekat

Perluasan pilihan penduduk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan atau pengeluarannya. Penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin. Oleh karena itu IPM mengungkap pengeluaran per kapita sebagai salah satu indikator pembangunan manusia.

Pengeluaran per kapita Kepulauan Riau tahun 2018 sebesar Rp 13,98 juta per tahun dan meningkat 3,39 persen menjadi Rp 14,47 juta per tahun pada 2019. Rata-

rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Kepulauan Riau selama 2015-2019 sebesar 2,03 persen per tahun.

Gambar 4.5. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Juta)



Sumber Data : BPS, BRS IPM Kepulauan Riau 2019

Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota bervariasi, namun pola perkembangan tiap tahunnya sama dengan pola provinsi yakni terus mengalami peningkatan yang positif. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau yakni mencapai 9,09 persen atau tiap tahunnya meningkat sekitar 2,27 persen. Disusul kemudian oleh Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna yang mengalami peningkatan pengeluaran per

kapita tercepat kedua setelah Kota Tanjungpinang. Peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna periode 2015-2019 sama sebesar 8,39 persen atau meningkat 2,10 persen per tahunnya. Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran per kapita terkecil terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total pertumbuhan sebesar 6,92 persen selama lima tahun terakhir. Namun demikian secara nominal, Kota Batam memiliki pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau yakni mencapai Rp 18,15 juta per tahunnya. Kabupaten/Kota lainnya mengalami pertumbuhan pengeluaran per kapita berkisar 1-2 persen selama periode 2015-2019.

BAB 5

TANTANGAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KEPULAUAN RIAU

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 5

Tantangan Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

5.1. Tantangan di Bidang Kesehatan

Salah satu keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah dapat diukur dari tingkat kesehatan masyarakatnya. Berdasarkan teori Henrik L. Blum (Notoatmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

Telah disinggung pada bab 3 bahwa capaian AHH Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengandung makna bahwa kualitas pembangunan manusia di bidang kesehatan berjalan dengan baik. Terakhir tahun 2019, AHH Kepulauan Riau mencapai 69,80 yang artinya bahwa seorang bayi lahir hidup di Kepulauan Riau berpeluang untuk hidup hingga 69,80 tahun. Namun demikian, angka ini masih berada di

bawah rata-rata angka nasional (Indonesia) yang mencapai 71,34.

BPS mencatat bahwa angka kesakitan (morbiditas) di Kepulauan Riau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka kesakitan ini merefleksikan persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-harinya. Angka kesakitan tahun 2015 mencapai 21,28 persen dan angka kesakitan pada tahun 2019 mencapai 21,37 persen. Sementara itu, angka kesakitan selama 2016 hingga 2018 mengalami fluktuasi yang cenderung naik.

Gambar 5.1. Perkembangan Angka Kesakitan Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019 (%)



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Berdasarkan teori Henrik L. Blum, tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen, sedangkan perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatannya yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo dkk, 1997).

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan, antara lain adalah kondisi sanitasi dan akses air bersih. Akses sanitasi layak merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit.

Pada tahun 2019 penduduk Kepulauan Riau yang sudah menikmati sanitasi layak adalah sebesar 97,60 persen, yang artinya masih ada sekitar 2,40 persen penduduk Kepulauan Riau belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak. Penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi layak tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 97,47 persen.

Sementara itu, akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dengan adanya pembangunan sarana air bersih di suatu wilayah/daerah, beberapa infeksi oleh mikrobakteria, misalnya kolera, disentri, tifus, dan lainnya dapat dikurangi (Said, 1999). Namun demikian, suplai air bersih tersebut harus memenuhi standar kesehatan agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2019, rumah

tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan air ledeng (termasuk air kemasan) sebagai sumber air minum sudah mencapai 83,76 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, maka hanya Kota Batam saja yang angkanya sudah di atas angka provinsi, sedangkan kabupaten/kota lainnya angkanya masih relatif rendah.

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2019

Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga dengan			
	Penerangan Listrik	Air Minum Ledeng & Kemasan	Air Minum Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	99,69	53,43	77,26	96,66
Bintan	98,65	44,2	66,15	75,99
Natuna	99,48	58,99	75,70	62,70
Lingga	99,22	58,96	76,66	68,99
Kep.Anambas	99,58	50,47	59,26	25,68
Batam	99,72	98,18	99,17	95,70
Tanjungpinang	100	76,12	93,76	88,41
Kep. Riau	99,64	83,76	91,53	90,24

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019

Sementara itu, rumah tangga pengguna air bersih (bersumber dari air ledeng, kemasan, dan pompa,

sumur/mata air terlindung) pada tahun 2019 tercatat sebesar 91,53 persen.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan, terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2019, banyaknya rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 90,24 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang sudah berada di atas nilai Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk

adalah banyaknya kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Data ini bermanfaat untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap persalinan yang sehat serta menakar kualitas dan akses layanan kesehatan utamanya layanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan tingkat kematian ibu dan anak.

Pada tahun 2019, tingkat kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 99,05 persen yang berarti dari 100 kelahiran yang terjadi masih ada sekitar 1 proses kelahiran yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Seiring usaha pemerintah dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan persalinan yang sehat.

Secara rata-rata kondisi persalinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sudah membaik di atas 90 persen. Sementara itu, tingkat pemanfaatan tenaga kesehatan dalam proses melahirkan yang sudah mencapai 100 persen terdapat di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Tabel 5.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Penolong Persalinan					Total
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Beranak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Karimun	40,95	-	58,06	0,99	-	100
Bintan	37,38	0,70	60,03	1,90	2,10	100
Natuna	35,88	0,65	56,62	6,85	-	100
Lingga	26,07	-	64,76	8,13	1,04	100
Kep.Anambas	25,63	2,48	61,39	9,18	1,32	100
Batam	62,65	-	35,06	2,29	-	100
Tanjungpinang	55,87	-	44,13	-	-	100
Kep. Riau	55,97	0,11	41,48	2,67	0,05	100

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019

Tantangan lain di bidang kesehatan adalah tenaga medis yang membantu proses kelahiran anak. Secara umum, proses kelahiran anak lahir hidup di Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh bidan (41,48 persen) dan dokter kandungan (55,97 persen). Hal tersebut cukup bagus, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang memilih untuk melahirkan di dukun beranak (0,05

persen). Penduduk yang melahirkan dibantu oleh dukun beranak paling banyak terjadi di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dapat diduga bahwa tenaga kesehatan di kedua kabupaten tersebut (terutama di pulau-pulau terluar) belum memadai sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan selain dukun beranak.

Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari perilakunya. Merokok merupakan salah satu pola hidup tidak sehat karena kandungan cafein di dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 menyebutkan bahwa rata-rata sebanyak 20,34 persen penduduk Kepulauan Riau yang mengkonsumsi rokok tiap hari. Rata-rata rokok yang dikonsumsi dalam satu minggu sebanyak 115 batang atau sekitar 1 batang rokok tiap 87 menit sekali.

Status gizi merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan penduduk selain AHH dan angka kesakitan. Status gizi pada bayi dapat dilihat dari pemberian Air Susu Ibu (ASI) karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan

bayi, selain itu ASI juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Masih dari Susenas tahun 2019, bahwa sebanyak 86,66 persen baduta (penduduk bawah dua tahun) berumur 0-23 bulan pernah diberi ASI. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan akan pentingnya kesehatan.

5.2. Tantangan di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam peningkatan SDM, karenanya kualitas dan mutu pendidikan di provinsi ini harus terus ditingkatkan dan harus terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar kualitas SDM di provinsi ini dapat dibanggakan dan dapat bersaing dengan SDM dari provinsi dan negara lainnya. Tantangan pembangunan manusia bidang pendidikan di Kepulauan Riau tahun 2015 dapat dirangkum sebagai berikut:

Kualitas anak didik, merupakan tantangan pertama yang dihadapi dan perlu dikaji lebih mendalam penyebabnya. Kualitas anak didik dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan angka mengulang. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga

negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan.

Gambar 5.2. APS Usia Penduduk 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2017-2019 (%)



Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau 2019

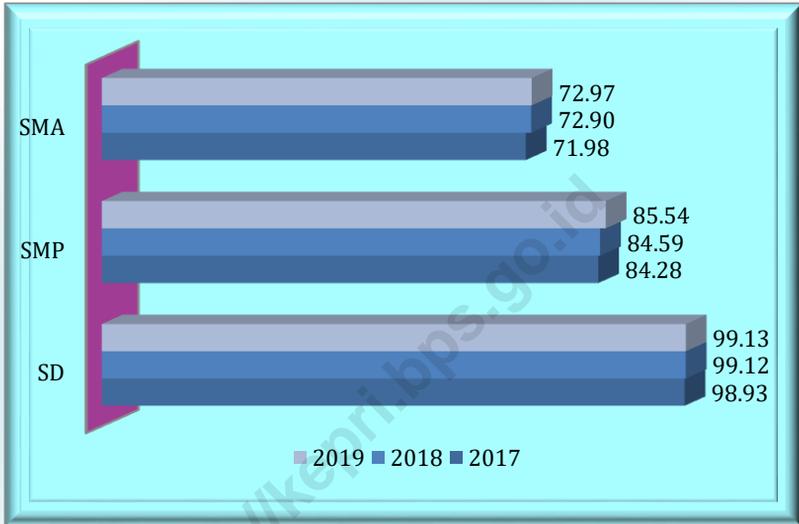
APS Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Hingga tahun 2019, APS pada jenjang usia 7-12 tahun di Kepulauan Riau mencatat hasil yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 di Kepulauan Riau, APS pada jenjang usia 7-12 tahun telah

mencapai 99,48 persen. Sementara itu, APS pada jenjang usia 13-15 tahun juga di atas 90 persen dan APS pada jenjang usia 16-18 tahun masih 80 persen. Dengan melihat capaian APS pada jenjang usia 13-15 tahun yang sudah meningkat, maka sedikit lagi perlu ditingkatkan untuk memenuhi pendidikan dasar selama 9 tahun.

APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Misalnya, APS pada jenjang usia 7-12 mengabaikan informasi anak berusia 12 tahun yang bersekolah pada kelas VII. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) lebih relevan.

Pada tahun 2019, capaian APM SD telah mencapai 99,13 persen. Sementara itu, APM SMP sebesar 85,54 persen dan SMA sebesar 72,97 persen atau dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.3. APM Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2017-2019 (%)



Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau 2019

Dari Gambar 5.2, terlihat bahwa secara keseluruhan kelompok usia sekolah baik itu kelompok usia sekolah SD, SMP, maupun SMA di Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan APM pada tahun 2019 dibandingkan dengan APM tahun sebelumnya.

5.3. Tantangan di Bidang Ekonomi

Sebagai provinsi yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun membangun secara mandiri, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan perbaikan ekonomi yang

berkelanjutan. Tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Tantangan Geografis. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dengan total jumlah pulau sebanyak 2.408 pulau besar dan kecil yang tersebar serta 96 persen wilayahnya adalah lautan tentu membutuhkan strategi pembangunan yang berbeda. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah dan sekaligus membangun keterkaitan antar wilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut.

Posisi kepulauan yang tersebar seringkali menyebabkan program pembangunan yang dibuat hanya difokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program. Kondisi ketimpangan dalam perekonomian terlihat jelas dari disparitas yang cukup tinggi dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto yang sangat didominasi oleh Kota Batam lebih dari 60 persen dengan pergerakan PDRB yang lamban di kabupaten kota lainnya.

Tabel 5.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	PDRB (Milyar)
(1)	(2)
Karimun	13 536,86
Bintan	21 301,05
Natuna	21 790,50
Lingga	4 269,27
Kep.Anambas	17 433,57
Batam	164 484,02
Tanjungpinang	20 167,98
Kepulauan Riau	262 983,30

Sumber Data : BPS, PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2019

Tantangan Demografis. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,1 juta jiwa pada tahun 2019 dengan persebaran yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Penduduk yang terkonsentrasi di Kota Batam hingga di atas 50 persen dari total penduduk menyebabkan ketimpangan pembangunan yang cukup terasa. Berikut disajikan tabel persebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.4. Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019

Kabupaten/ Kota	2018	2019
(1)	(2)	(2)
Karimun	231 145	232 797
Bintan	157 927	159 403
Natuna	76 968	77 771
Lingga	89 781	89 781
Kep.Anambas	41 927	42 309
Batam	1 329 773	1 376 609
Tanjungpinang	209 280	211 583
Kepulauan Riau	2 136 521	2 189 653

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2020

Penyediaan infrastruktur dasar yang belum memadai. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkualitas membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, antara lain transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi terutama dalam distribusi barang dan jasa diperlukan keterpaduan moda sarana transportasi.

Dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan menyebabkan transportasi laut dan udara menjadi kebutuhan vital, namun

membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar. Keterkaitan moda transportasi laut, udara, dan darat dibangun untuk meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar guna meningkatkan akselerasi perekonomian. Permasalahan transportasi masih menjadi kendala dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
(1)	(2)	(2)	
Karimun	99,02	0,67	0,31
Bintan	93,98	4,67	1,35
Natuna	97,74	1,74	0,52
Lingga	79,80	18,42	0,78
Kep.Anambas	71,60	27,97	0,42
Batam	98,28	1,44	0,28
Tanjungpinang	99,91	0,09	0,00
Kepulauan Riau	96,90	2,74	0,36

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2020

Infrastruktur berikutnya yang masih perlu pengembangan adalah yang berkaitan dengan ketersediaan listrik. Berdasarkan data Susenas 2019 masih

terdapat rumah tangga yang tidak mendapatkan aliran listrik dari PLN atau bahkan sumber penerangan utamanya bukan listrik. Keberadaan jaringan listrik sangat berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk itu berbagai usaha perluasan jaringan listrik mutlak diperlukan.

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 6

DISPARITAS
PEMBANGUNAN MANUSIA
ANTAR DAERAH

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 6

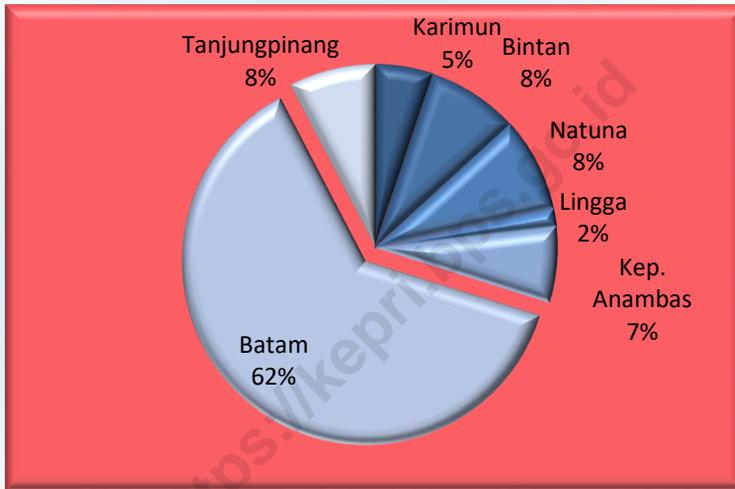
Disparitas Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

Disparitas atau ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang lazim muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu wilayah. Disparitas pembangunan antardaerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam di masing-masing daerah. Disparitas pembangunan merupakan kendala untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agenda pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Disparitas pembangunan antardaerah dalam jangka panjang dapat memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat dan secara langsung akan mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar daerah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya

digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Gambar 6.1 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kota di Kepulauan Riau, 2019



Sumber Data : BPS, PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2019

Seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian Kepulauan Riau ditopang oleh Kota Batam. Kota Batam menguasai lebih dari separuh perekonomian Kepulauan Riau secara keseluruhan. BPS mencatat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Riau tahun 2019 didominasi oleh Kota Batam (Gambar 6.1). Dominasi ekonomi yang kuat di Kota Batam ditengarai sebagai cikal bakal semakin lebarnya kesenjangan pembangunan di

berbagai dimensi kehidupan antara Kota Batam dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu dalam kajian ini menarik untuk membahas mengenai kesenjangan pembangunan kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Batam dan Non Batam

Batam merupakan kota di Kepulauan Riau yang berada di perairan Selat Malaka dan berbatasan laut dengan Singapura. Batam sendiri merupakan nama salah satu pulau terbesar di wilayah Kota Batam yang seluruhnya terdiri atas 329 pulau. Pulau Batam sejak jaman dahulu telah dikenal diberbagai penjuru dunia karena letak geografisnya yang berada di jalur utama perdagangan dunia.

Mengingat letaknya yang cukup strategis, pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi. Infrastruktur modern dibangun sehingga menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan investasi di Batam. Hal ini tentu saja menjadi faktor penarik roda ekonomi Batam.

Berbeda dengan Batam, Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan

sebagai pusat pemerintahan. Tentu saja perekonomian Tanjungpinang berjalan lebih stabil dibandingkan dengan Batam yang cukup meroket. Selain Batam dan Tanjungpinang, masih ada lima kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Secara kasat mata perekonomian kabupaten/kota tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Batam. Hal ini, terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara Batam dan non Batam (kabupaten/kota selain Batam).

Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota

Tahun 2019, IPM Kota Batam tercatat sebesar 81,09, merupakan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sedangkan IPM terendah di Kabupaten Lingga mencapai 64,98. Perbedaan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau. Kota Batam masuk dalam kategori “sangat tinggi”, sedangkan beberapa kabupaten/kota masuk dalam kategori pembangunan manusia “tinggi” dan sisanya masuk dalam kategori pembangunan manusia “sedang” (Gambar 6.2.).

Disparitas tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Diperlukan suatu upaya

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sebagai titik awal menuju pemerataan pembangunan.

Gambar 6.2 Klasifikasi IPM Kabupaten Kota di Kepulauan Riau Tahun 2019

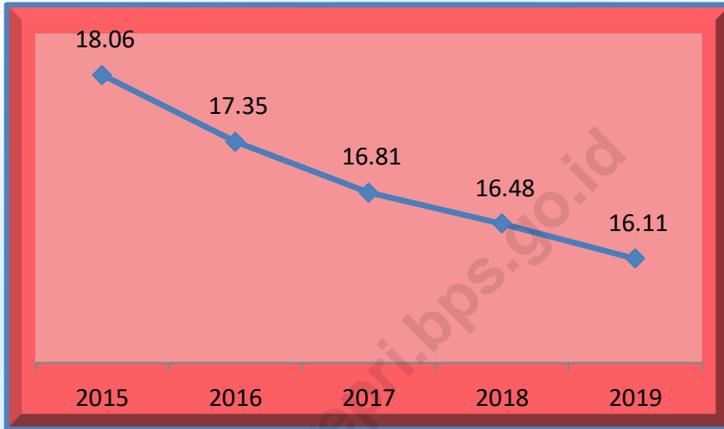


Sumber Data : BPS, BRS IPM Provinsi Kepulauan Riau 2019

Hingga tahun 2019, terjadi peningkatan pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota. Peningkatan pembangunan manusia tersebut dibarengi dengan pengurangan kesenjangan pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Dalam hal ini upaya pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Riau untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata perlu diapresiasi.

Namun demikian, upaya pemerataan kesenjangan pembangunan manusia perlu tetap dilanjutkan untuk mencapai konvergensi pembangunan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 6.3 secara lebih lengkap dari tahun 2015 hingga tahun 2019

Gambar 6.3 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Provinsi Kepulauan Riau 2019

Hingga tahun 2019, terjadi peningkatan pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota. Peningkatan pembangunan manusia tersebut dibarengi dengan pengurangan kesenjangan pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Dalam hal ini upaya pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Riau untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata perlu diapresiasi. Namun demikian, upaya pemerataan kesenjangan pembangunan manusia perlu tetap dilanjutkan untuk mencapai konvergensi pembangunan.

Kesenjangan Kesehatan

Kesenjangan kesehatan antar-kabupaten/kota di Kepulauan Riau semakin menurun. Selama periode 2015 hingga 2019 selisih AHH (jarak antara AHH tertinggi dengan AHH terendah) semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat Kepulauan Riau semakin membaik. Namun demikian sejatinya masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan.

Gambar 6.4 Perkembangan Selisih AHH Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Provinsi Kepulauan Riau 2019

Tahun 2019, kesenjangan AHH antar-kabupaten/kota di Kepulauan Riau sebesar 11,54 tergolong tinggi dimana AHH tertinggi di Kota Batam sebesar 73,29 dan AHH terendah di Lingga sebesar 61,75. Apabila ditelusuri lebih mendalam, kesenjangan pembangunan kesehatan masyarakat antara Batam dan Lingga dapat disebabkan oleh kesenjangan fasilitas kesehatan masyarakat dan jumlah tenaga medis.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat bahwa pada tahun 2019 jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di Batam sebanyak 22 unit yang terdiri atas 18 rumah sakit umum dan 4 rumah sakit khusus dan 20 puskesmas. Sedangkan di Lingga hanya memiliki 2 unit rumah sakit dan 11 puskesmas. Kemudian dari sisi jumlah tenaga medis, Batam memiliki 2.509 tenaga medis dari berbagai kalangan (seperti: dokter, farmasi, perawat, bidan, ahli gizi), sedangkan Lingga hanya memiliki 556 tenaga medis saja.

Dari Tabel 6.1 di atas dapat diketahui bahwa Batam mendominasi, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki tenaga medis yang jumlahnya jauh di bawah Batam. Kesenjangan pembangunan kesehatan ini perlu ditindaklanjuti bersama antara pemerintah daerah dengan

seluruh elemen masyarakat karena kesenjangan disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah namun juga budaya masyarakat, sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Tentunya, pembangunan kesehatan ini harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil.

Tabel 6.1. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Tenaga Kesehatan					Jumlah
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Karimun	72	443	290	43	14	862
Bintan	77	377	250	31	20	755
Natuna	36	225	138	34	18	451
Lingga	22	293	195	34	12	556
Kep.Anambas	19	222	124	13	17	395
Batam	293	1 398	572	206	40	2 509
Tanjungpinang	128	646	206	82	15	1 077

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019

Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan di Kepulauan Riau juga memiliki trend yang baik, semakin lama semakin menurun. Selisih rata-rata lama sekolah antara Kota Batam (kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Kepulauan Riau) dan Kabupaten Lingga (kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah terendah di Kepulauan Riau) cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2019.

Gambar 6.5 Perkembangan Selisih Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Provinsi Kepulauan Riau 2019

Kesenjangan pendidikan juga terlihat dari rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah. Kesenjangan angka harapan lama sekolah di tingkat kabupaten/kota terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Lingga. Pada tahun 2019, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kota Tanjungpinang dapat berpotensi menempuh pendidikan selama 14,09 tahun, sedangkan di Kabupaten Lingga hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 12,44.

Gambar 6.6 Perkembangan Selisih Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Provinsi Kepulauan Riau 2019

Secara angka, kesenjangan angka harapan lama sekolah tidak terlalu jauh, namun menjadi masalah ketika

kesenjangan tersebut semakin melebar. Tercatat selama 2015 hingga 2019 selisih angka harapan lama sekolah tertinggi dengan terendah di tingkat kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan.

Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, pengeluaran per kapita kabupaten/kota di Kepulauan Riau terus meningkat. Namun masih menyisakan persoalan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Kesenjangan pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi dengan terendah tahun 2015 sebesar Rp 5.667 juta per tahun terus mengalami fluktuasi sampai sebesar Rp 6.055 juta per tahun pada tahun 2019. Tahun 2019, pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau berada di Batam yakni sebesar Rp 18.146 juta per tahun, sedangkan pengeluaran per kapita terendah berada di Lingga sebesar Rp 12.091 juta per tahun.

Gambar 6.7 Perkembangan Selisih Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kota Tertinggi dengan Terendah di Kepulauan Riau, Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS, BRS IPM Provinsi Kepulauan Riau 2019

Kesenjangan pengeluaran per kapita di Kepulauan Riau disebabkan oleh bertumpunya kegiatan ekonomi di Kota Batam sehingga kegiatan ekonomi di Batam lebih bervariasi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Tercatat bahwa Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan tingkat pendapatan di suatu wilayah antar-kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2019, lebih dari 60 persen ekonomi Provinsi Kepulauan Riau ditopang oleh Kota Batam. Artinya, peranan Kota Batam terhadap Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Oleh karena itu,

pemerintah daerah perlu mengatur kebijakan ekonomi sedemikian rupa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi antara Batam dan non Batam.

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 7

IPG DAN IDG
KEPULAUAN RIAU

<https://kepri.bps.go.id>

BAB 7

Pembangunan Pemberdayaan Gender Kepulauan Riau

7.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pada dasarnya hakekat pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh penduduk dengan tidak membedakan suku, agama, asal, maupun jenis kelamin. Ditengarai pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang lebih banyak menguntungkan kepada pihak laki-laki. Tentunya untuk menjawab hal itu tidak mudah, perlu adanya kajian yang mendalam terhadap keseluruhan aspek pembangunan.

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Pembangunan Manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau *gap* kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah *gap* kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi *gap* kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.

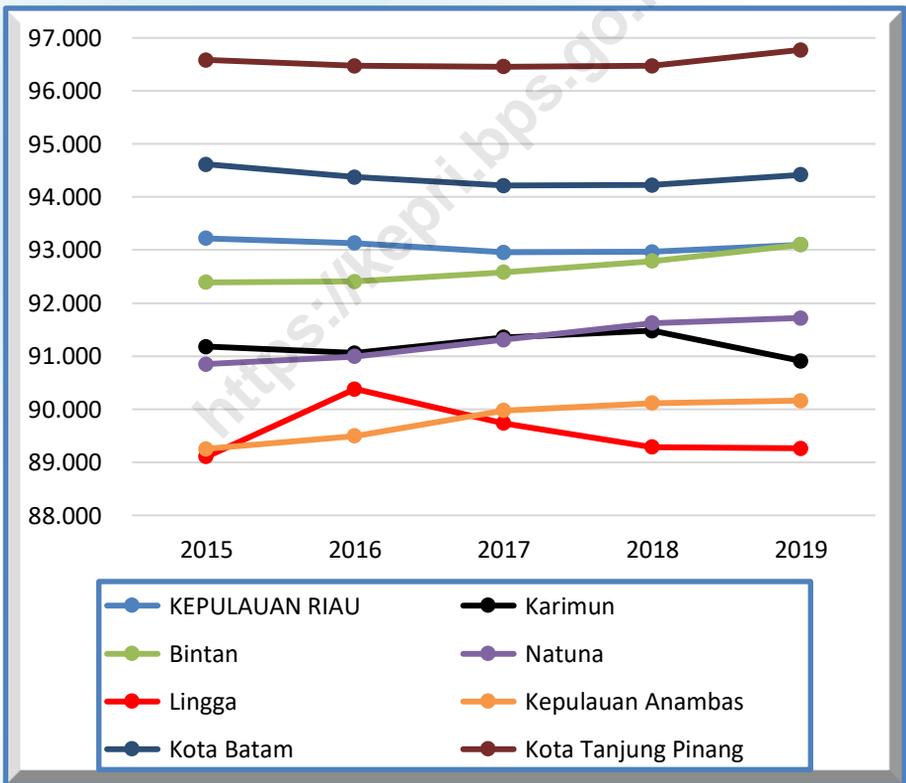
Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) merupakan rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Angka IPG dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu:

- semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki;
- $IPG < 100$, capaian perempuan $<$ capaian laki-laki;

IPG Kepulauan Riau

- IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki;
- IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki.

Gambar 7.1. IPG Kepulauan Riau dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Angka IPG Kepulauan Riau dan kabupaten/kota di Kepulauan Riau setiap tahunnya cukup variatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dilihat pada Gambar 7.1. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Anambas, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna mengalami kecenderungan meningkat untuk nilai IPG yang dihasilkan. Sedangkan untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun dan Kota Batam mengalami kecenderungan menurun. Secara umum, untuk nilai IPG Provinsi Kepulauan Riau mengalami kecenderungan menurun. Hal ini berarti bahwa hasil-hasil pembangunan lebih banyak dapat dinikmati oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan. Atau dalam artian lain bahwa penduduk laki-laki lebih banyak memiliki pilihan-pilihan dalam kehidupannya untuk menikmati pembangunan dibandingkan kaum perempuan.

7.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

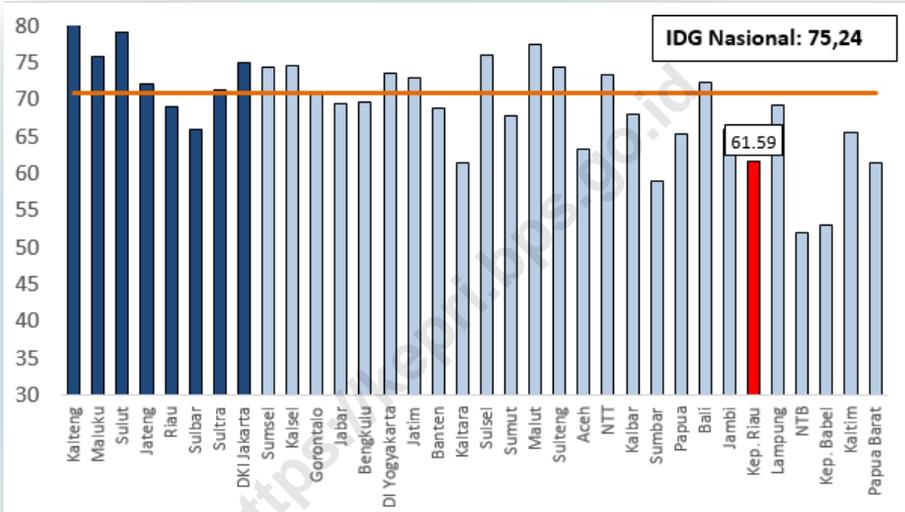
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek

ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peranan bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu: keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Pengukuran IDG pada level provinsi dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap pencapaian persamaan peranan perempuan dan laki-laki

sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan pada suatu provinsi.

Gambar 7.2. IDG Menurut Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Keterbandingan nilai IDG antarprovinsi tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.3. Pada gambar tersebut, tampak bahwa hanya tujuh provinsi yang memiliki capaian IDG di atas rata-rata IDG nasional, yaitu: Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi dalam pencapaian IDG pada tahun 2019, sedangkan posisi terendah ditempati

oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IDG masing-masing sebesar 83,20 dan 51,91. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan sebesar 31,20 poin. Sementara itu, IDG Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah rata-rata nasional dengan nilai sebesar 61,59.

Tabel 7.1. IDG Menurut Indikator dan Kabupaten Kota di Kepulauan Riau Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di dalam Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	16,67	49,58	25,41	64,17
Bintan	24,00	52,22	24,30	69,71
Natuna	0,00	39,47	24,51	42,02
Lingga	5,00	52,38	23,15	48,96
Kep.Anambas	10,00	46,88	26,09	57,74
Batam	8,00	41,40	29,31	58,40
Tanjungpinang	36,67	41,37	26,92	76,13
Kepulauan Riau	11,11	43,16	28,61	61,59

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2019

Bila dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, maka IDG kabupaten/kota di Kepulauan Riau pada tahun 2019 masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Kabupaten Natuna menempati posisi terendah di

Kepulauan Riau dengan nilai IDG sebesar 42,02. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya keterlibatan perempuan di parlemen di Kabupaten Natuna (0 persen) atau dapat dilihat pada Tabel 7.1.

<https://kepri.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan Ahmad Yani No.21. Tanjungpinang 29124
Telp. 0771-4500150, 4500155. Fax. 0771-4500157
<http://kepri.bps.go.id>. Email: bps2100@bps.go.id

